

KEMANDIRIAN SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DI SD MUHAMMADIYAH WIROBRAJAN 1 YOGYAKARTA

Nur Hidayah Nasori, M.Pd.
PGSD, Universitas Ahmad Dahlan
nur.hidayah@pgsd.uad.ac.id

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan salah satu keberhasilan dari program sekolah. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan sekolah berjalan dengan baik diperlukan kemandirian sekolah dalam mengelola pembiayaan sekolah. Kemandirian sekolah dalam mengelola pembiayaan merupakan hal sangat penting dalam keseluruhan rangkaian manajemen pembiayaan meliputi sumber dana pembiayaan, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemandirian sekolah dalam mengelola pembiayaan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan bendahara sekolah. Objek penelitian ini adalah kemandirian sekolah, manajemen pembiayaan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kemandirian dalam pencarian sumber dana pembiayaan sudah berjalan dengan baik diperoleh dengan pengalokasian sumber biaya untuk penganggaran program sekolah. 2) kemandirian dalam perencanaan pembiayaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam perencanaan penggunaan anggaran pembiayaan sekolah. 3) kemandirian dalam pelaksanaan pembiayaan sudah berjalan dengan baik, dimulai dari ketentuan oleh BOS sampai dengan pengalokasian sarana dan prasarana sekolah. 4) pengawasan pembiayaan sudah berjalan dengan baik, dari kegiatan, dan waktu pengawasan pertanggungjawaban pembiayaan yang bersifat transparansi.

Kata Kunci: kemandirian, manajemen, pembiayaan.

A. PENDAHULUAN

Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian tidak hanya dimiliki oleh setiap individu tetapi kemandirian harus dimiliki oleh setiap organisasi bahkan lembaga-lembaga besar tertentu. Kemandirian sangatlah penting, tidak hanya ada dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Kemandirian juga penting dalam dunia pendidikan, karena itu merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional bangsa kita. Adapun ciri-ciri sekolah mandiri menurut Susilo (2016: 632), yakni unggul dalam manajemen sekolah, pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, perbaikan evaluasi, pengadaan tenaga pendidik dan non kependidikan, penggalan dana, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu akademis, kedisiplinan civitas akademik, peningkatan SDM maupun hal-hal lain.

Tujuan pendidikan membantu peserta didik membangun karakter yang baik serta mengembangkan kreativitas dan kecerdasan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dibutuhkan biaya pendidikan yang memegang peran penting dalam keberlangsungan kemajuan pendidikan nasional sehingga pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan anggaran yang relatif besar. Keberhasilan pembiayaan sekolah tidak terlepas dari manajemen untuk mengatur pengeluaran sampai pengawasan biaya

pendidikan sekolah. Dalam menyelenggarakan program sekolah diperlukan biaya pendidikan untuk meningkatkan sarana prasarana serta seluruh kegiatan pembelajaran mengeluarkan dana untuk kegiatan sekolah. Biaya dipergunakan diantaranya fasilitas penunjang pembelajaran serta untuk membayar gaji tenaga pendidik. Pembiayaan dikatakan sebagai investasi jangka panjang yang bagus untuk sekolah dan kemajuan program sekolah tidak terlepas dari pembiayaan.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang baik perlu adanya manajemen pembiayaan untuk mengatur seluruh pengeluaran dana pendidikan agar dapat terencana serta akuntabilitas dana pendidikan. Dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan, unsur pembiayaan merupakan unsur utama dalam keberhasilan program sekolah. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan berjalan dengan baik diperlukan standar pembiayaan yang sudah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Permen No 69 Tahun 2009 tentang standar biaya. Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Sedangkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari keadaan pembiayaan pendidikan di dalamnya, karena pada dasarnya mutu pendidikan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Menurut Munir (2013:226) dalam segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya dan pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan belum bisa berjalan secara maksimal.

Pembiayaan pendidikan menjadi masalah yang penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini karena pembiayaan menyangkut masalah tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Meskipun masalah pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan. Namun, pembiayaan berkaitan dengan komponen yang ada di dalamnya. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran.

Manajemen pembiayaan sekolah berkaitan dengan pendanaan pendidikan yang dijelaskan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 2 berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh sampai lima belas tahun. Sehingga orang tua peserta didik yang tidak mampu berhak mendapatkan biaya pendidikan dari pemerintah. Standar biaya pendidikan mencakup standar yang mengatur komponen besarnya biaya operasi, biaya investasi, dan biaya personal. Manajemen pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen pendidikan secara keseluruhan. Karena pada hakikatnya anggaran dari pembiayaan merupakan penjabaran program yang harus dipertanggungjawabkan bersama guna mencapai program diakhir tahun anggaran.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan Ibu Isnarsiam selaku kepala sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta diperoleh hasil bahwa komite sekolah kurang aktif, perannya komite sekolah harus bertanggung jawab dan aktif sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terkait dengan manajemen pembiayaan. Adanya keterlambatan pembayaran SPP akan menyebabkan pembayaran gaji guru terlambat sehingga sekolah mempunyai aturan

tersendiri dalam keterlambatan dalam pembayaran SPP . Pada dasarnya sekolah membutuhkan pemasukan operasional untuk kegiatan yang dilakukan sekolah, untuk pemasukan pembiayaan, pemasukan SPP dari siswa akan dikelola kembali untuk gaji guru, dan biaya-biaya lainnya.

Kepala sekolah mengalami kesulitan dalam mencari dana dan sekolah tidak terlalu banyak mempunyai sumber-sumber dana untuk dialokasikan dalam pembiayaan dan dana yang diterima tidak sesuai dengan rencana pengeluaran anggaran yang dilaksanakan untuk kegiatan, sehingga sekolah harus mencari sumber dana lagi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepala sekolah membutuhkan kreativitas dan kemandirian dalam menggali sumber-sumber dana. Selain itu sekolah mengatur dana pembiayaan pendidikan untuk digunakan keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan serta banyak kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan, sehingga sekolah harus melakukan manajemen biaya yang baik karena, tujuan manajemen merupakan keberhasilan kegiatan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan penelitian ini di fokuskan pada kemandirian sekolah dalam mengelola pembiayaan dalam program *full day school* yang sudah berjalan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Wirobrajan 1.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Muhammadiyah Wirobrajan 1 yang berlokasi di Jalan Hos Cokrominoto, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Alasan pemilihan tempat karena sekolah ini mandiri dalam pengelolaan pembiayaan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah. Sedangkan objek penelitian ini adalah kemandirian sekolah dan manajemen pembiayaan.

4. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan kepada informan adalah wawancara terbuka. Pedoman wawancara yang digunakan dalam melakukan wawancara hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Sedangkan dokumentasi, penulis menggunakan dokumentasi sebagai memperkuat data yang mengenai dokumen pembiayaan,

5. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data menggunakan data secara interaktif model Miles dan Huberman. Analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh sumber data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul disajikan dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan deskripsi dokumen data.

b. Reduksi Data

Data-data yang diperoleh dari lapangan dicatat atau direkam dalam kaset *tape recorder* dalam bentuk deskriptif naratif, yaitu uraian data yang diperoleh di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta apa adanya tanpa ada komentar peneliti tentang rangkaian manajemen pembiayaan dalam bentuk catatan-catatan kecil dan transkrip wawancara.

c. Penyajian Data (Display Data)

Pada tahap ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk naratif, yaitu uraian tertulis tentang proses manajemen pembiayaan sekolah di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta. Tujuan penyajian data agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca

d. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi tentang proses dan aktifitas manajemen pembiayaan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta, selalu dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan melalui triangulasi sumber maupun metode.

C. HASIL DAN PEMBAHASAAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta, maka dapat dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan tentang kemandirian sekolah dalam manajemen pembiayaan yang meliputi sumber dana pembiayaan, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta sebagai berikut:

1. Sumber Biaya Pendidikan

Salah satu unsur penting yang dimiliki oleh sekolah adalah menjadi sekolah yang dapat mencetak peserta didik dari keuangan. Kekayaan sekolah dilihat dari jumlah peserta didik dan manajemen pembiayaan sangat penting hubungannya dalam kegiatan sekolah. Menurut Matin (2014:77) sumber pendapatan dan penerimaan sekolah berasal dari pemerintah, masyarakat, organisasi dan perorangan. Anggaran yang berasal dari pemerintah diterima melalui DIK (Daftar Isian Kegiatan) dan DIP (Daftar Isian Proyek).

SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan yang bersangkutan. Sumber dana pendidikan di sekolah ada beberapa sumber di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta ada biaya yang berasal dari pemerintah atau lembaga resmi dan sumber biaya dari wali murid berupa SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).

Sumber dana dari pemerintah pusat yakni BOS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik untuk kegiatan rutin yang tercantum dalam RAPBS. Selain itu ada bantuan dari pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten / kota. Dana dari APBD digunakan untuk kegiatan dibidang pendidikan rutin maupun pembangunan sekolah.

Ada empat sumber dana di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta yakni berasal dari BOS(Bantuan Operasional Sekolah) Pusat, BOSDA Swasta, PDM Kota Yogyakarta, dan Wali murid. Besaran jumlah dana yang diterima selama satu tahun

atau semester berbeda-beda. Terutama bantuan dari BOS dengan alokasi jumlah siswa yakni ada 136 siswa dikalikan dengan anggaran untuk SD sebesar Rp 800.000, maka dana dari BOS sebesar Rp 108.800.000 pertahun, BOSDA sebesar Rp. 76.000.000 per tahun, PDM Kota Yogyakarta sebesar Rp 576.000 per tahun, dan bantuan dari wali murid sebesar Rp 114.200.000 per tahun. Menurut Daryanto dan Farid (2013: 135) ada beberapa sumber dana pembiayaan sekolah yaitu, dana dari pemerintah, dana dari orang tua siswa, dana dari masyarakat, dana dari alumni, dana dari peserta kegiatan dan dana dari kegiatan wirausaha sekolah. Dari teori tersebut bahwa sumber dana yang ada di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta hanya berasal dari dana pemerintah dan orang tua siswa.

Di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta diizinkan menarik dana dari siswa, meskipun sekolah mendapat bantuan dari BOS Pusat atau pemerintah, karena sekolah swasta membutuhkan biaya operasional yang tinggi dalam memajukan mutu sekolah. Sumbangan dana dari murid akan menutupi kebutuhan dana operasional yang tidak dibiayai sepenuhnya dari pemerintah. Sekolah mematok beban SPP sebesar Rp 70.000 per bulan untuk tahun 2017/ 2018 sedangkan untuk tahun ajaran baru yaitu 2018/2019 akan dinaikkan sebesar Rp 10.000, maka akan menjadi Rp 80.000 perbulan sesuai dengan kesepakatan sekolah bersama dalam musyawarah dengan wali murid. Uang sekolah dan sumbangan pendidikan digolongkan kedalam jenis biaya personal.

Beban terberat sekolah swasta umumnya terletak pada gaji guru. Di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta mempunyai permasalahan pada umumnya yaitu orang tua murid telat dalam membayar uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa, oleh karena itu sekolah menunda membayar gaji guru dan segera melakukan pinjaman ke luar demi menutupi beban gurusehingga guru tetap menerima gaji setiap bulannya.

Di sekolah swasta tidak semua orang tua dapat membayar uang bulanan siswa berjalan dengan lancar setiap bulan. Khususnya di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta memiliki data penghasilan orang tua menengah ke bawah. Sekolah mempunyai solusi bagi siswa yang tidak mampu dengan bantuan subsidi silang ada bantuan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) berupa kartu Kartu Menuju Sehat (KMS) dari pemerintah. Bantuan dari KMS berupa kebutuhan sekolah seperti buku dan seragam dan benar-benar untuk warga miskin. Untuk mendapatkan bantuan, wali murid harus mengurus ke sekolah untuk bisa mendapat dana bantuan dari pemerintah atau sekolah langsung. Sehingga orangtua tidak berpikir sekolah menjadi sebuah beban bagi anaknya. Dan siswa wajib sekolah Sembilan tahun yang sudah dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku. Subsidi silang termasuk jenis biaya personal, didalam biaya personal ada subsidi silang bagi siswa yang kurang mampu.

Sumber dana pendidikan sekolah akan dianggarkan dalam laporan yang bernama RAPBS. Seluruh program menjadi prioritas pembiayaan sekolah sesuai dengan Sembilan standar nasional pendidikan yang ada di dalam RAPBS sekolah. Biaya program sekolah terdiri dari SNP yaitu, standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar pengembangan budaya. Di setiap satandar mempunyai penjabaran masing-masing dalam standar pendidikan.

2. Perencanaan Pembiayaan pada *Full Day School*

Perencanaan dalam manajemen pembiayaan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan disekolah. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari jenis kegiatan program yang telah direncanakan sekolah. Menurut Fattah (2011: 50) perencanaan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu sesuai dengan kegiatan program yang berjalan. Sekolah bertugas mengelola pembiayaan yang diperoleh dari berbagai sumber serta memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan maka diperlukan perencanaan anggaran sekolah yang tertuang dalam RAPBS. Perencanaan bertujuan untuk dapat mencapai maksimalisasi nilai organisasi Fungsi dan tanggung jawab manajer merencanakan sumber dana dan penggunaan dana yang diperoleh.

Di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta perencanaan pembiayaan dalam anggaran sudah berjalan dengan baik dalam pengalokasian sumber dana sekolah. Sebelum merencanakan kegiatan yang akan disusun dalam sebuah program, kepala sekolah melakukan rapat kerja sebelum memasuki tahun ajaran baru, kemudian kepala sekolah membentuk sebuah tim dan membagi tugas masing-masing dan merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama satu semester serta membuat rincian anggaran yang dibutuhkan sekolah. Dalam perencanaan sekolah memprioritas seluruh kegiatan demi meningkatkan mutu pendidikan

Perencanaan dalam pembiayaan meliputi penambahan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri peserta didik. Perencanaan pembiayaan untuk program tahunan sekolah mempermudah sekolah untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam mengatur keuangan sekolah dan memperkirakan berapa dana yang dibutuhkan sekolah. Perencanaan sangat bermanfaat dalam mengatur keuangan sekolah, sehingga dana yang dikeluarkan untuk program jangka panjang atau jangka pendek. Perencanaan jangka panjang dilakukan bersama oleh anggota sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 ditungkan kedalam rapat kerja tahunan.

Perencanaan anggaran di Wirobrajan 1 sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) bagaimana dana yang diperoleh dan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan apa saja. RAPBS memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Besarnya pengeluaran sekolah harus berlandaskan kepada besarnya pendapatan yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan.

Sekolah bertugas mengelola pembiayaan yang diperoleh dari berbagai sumber serta memiliki tanggung jawab dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan maka diperlukan perencanaan anggaran sekolah yang tertuang dalam RAPBS. Perencanaan penganggaran alokasi biaya termasuk ke dalam jenis biaya operasional. Dibuktikan dengan perencanaan dialokasikan kedalam sarana dan prasarana sekolah.

Persoalan penting dalam perencanaan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara efisien, mengalokasikan secara tepat. Sesuai dengan skala prioritas yang ditegaskan oleh teori Fattah (2012: 50) dibuktikan dengan data wawancara oleh kepala sekolah, guru dan bendahara bahwa sekolah memprioritaskan kegiatan sesuai dengan skala prioritas.

Skala prioritas sekolah adalah berupa program jangka panjang maupun jangka pendek yang dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Biaya Sekolah (RAPBS). Tujuan penyusunan anggaran ini sebagai pedoman pengumpulan dana dan pengeluaran biaya sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan pertanggungjawaban sekolah terhadap uang-

uang yang diterima. Sekolah swasta khususnya di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta tidak terikat oleh dana pemerintah terlalu banyak oleh karena itu, sekolah lebih bebas dalam menyusun RAPBS. Sehingga sekolah ada dana dari iuran Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang berasal dari iuran orang tua siswa dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orangtua murid dan ditentukan oleh sekolah sesuai dengan hasil musyawarah bersama.

Dalam penyusunan RAPBS, semua aspek keuangan beserta mekanisme penerimaan dan pengeluaran serta harga rincian setiap kegiatan yang akan dianggarkan harus diperhitungkan. Maka kepala sekolah harus memasukkan anggaran yang diperoleh dari sumber dana dalam usulan tahun yang akan datang yang dibahas dalam rapat kerja tahunan.

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta melibatkan peran guru serta staf sekolah termasuk TU dan komite sekolah. Kepala sekolah yang merupakan pemimpin dalam organisasi harus memiliki visi yang strategis dalam pembiayaan untuk satu tahun (jangka pendek) dan maksimal lima tahun (jangka panjang) yang ditegaskan dengan teori Supriadi (2010: 7) pemahaman berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. Pemahaman tersebut dimaksud merentang dari hal-hal sifatnya mikro hingga makro antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem, dan mekanisme pengalokasiannya.

Perencanaan membantu kepala sekolah dalam mengatur manajemen untuk mengetahui dampak maupun strategi yang akan dihadapi dalam pendapatan maupun belanja sekolah dalam Arus Kas Proyeksi setiap triwulan sekali. Sehingga permasalahan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta khususnya terdapat masalah keterlambatan orang tua dalam membayar SPP, kemudian kepala sekolah mencari solusi untuk menutupi kekurangan untuk membayar gaji pegawai dengan cara meminjam dari luar.

Di dalam perencanaan tugas kepala sekolah sangat penting yaitu bertugas mengawasi seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan biaya. Oleh karena itu, rencana keuangan terkendali. Kemudian didalam perencanaan terdapat manajer yaitu bendahara sekolah sebagai mengatur atau membuat anggaran (*budgeting*) sekolah seminim mungkin dan cukup untuk kegiatan satu tahun kedepan. *Budgeting* menampilkan rencana secara rinci yang dituangkan kedalam RAPBS.

3. Pelaksanaan Pembiayaan pada *Full Day School*

Dari hasil rincian pengeluaran anggaran belanja sekolah dapat dikelompokkan jenis biaya menurut Suharsaputra (2013:289) terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari gaji guru, dan personil lainnya serta pembelian buku fasilitas kegiatan belajar mengajar, alat laboratorium, buku pelajaran dan buku perpustakaan. Sedangkan biaya tidak langsung terdiri dari biaya hidup, transportasi dan biaya lain-lainnya. Secara lengkap pengeluaran dapat dilihat di lampiran dokumen RAPBS.

Menurut spesifikasi standar pembiayaan, selain penerimaan dana yang berasal dari pemerintah, sekolah mengadakan *catering* makan siang untuk siswa yang merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan tambahan dukungan biaya dan keuntungan sekolah dari *catering* mendapat keuntungan sebesar seribu rupiah peranak. Hasil dari keuntungan *catering* makan siang siswa dialokasikan untuk kegiatan sekolah.

4. Pengawasan Pembiayaan pada *Full Day School*

Kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah *auditing* yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau pengeluaran uang yang dilakukan bendaharawan untuk kegiatan sekolah. Pengawasan menurut Fattah (2009:65) bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Selain itu dengan ada pengawasan, biaya yang diperoleh dari sumber pemerintah maupun wali murid dapat diperhatikan dari aspek manajemen.

Proses pengawasan pembiayaan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta dilakukan pengawasan oleh kepala sekolah secara berkala atau setiap triwulan sekali yang dibukukan dalam RAPBS dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan sekolah termasuk jenis kegiatan pengawasan memantau (*monitoring*) kemudian melaporkan hasil-hasil temuan ke pemerintah pusat.

Kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan dengan lancar. Jenis kegiatan pengawasan ini termasuk jenis kegiatan memantau hasil kerja. Tujuan pengawasan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan.

Kegiatan pengawasan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta meliputi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penelaahan data dan informasi tentang penggunaan anggaran yang diwujudkan dalam bentuk perkembangan dan hasil pelaksanaan rencana dan program dibukukan dalam bentuk RAPBS yang sudah sesuai dengan standar pembukuan dalam RAPBS. Dari hasil perolehan data yang telah ditemukan bahwa pengawasan lebih ditekankan pada pembukuan atau pelaporan yang akan dilakukan setiap triwulan sekali dan dilaporkan ke dinas pendidikan atau ke PDM Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan bendahara sekolah.

Pengawasan juga dilakukan oleh tim pengawas dari luar yaitu pemerintah daerah. Dibuktikan dengan hasil wawancara oleh kepala sekolah. Pengawasan pembiayaan pada sekolah yang menerapkan program *full day school* tidak ada bedanya dengan sekolah yang belum melaksanakan *full day school*. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan aturan dari pemerintah daerah maupun pusat. Pengawasan pembiayaan juga dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengetahui seluruh rincian pengeluaran kegiatan kepada pihak yang berwenang.

Pengawasan dilakukan setiap triwulan dan setiap tengah tahunan dan laporan tahunan. Untuk kegiatan pengawasan seluruh kegiatan sekolah akan diawasi oleh kepala sekolah yang akan dilakukan pengecekan setiap bulan dalam pengeluaran dan pemasukan sekolah dalam RAPBS. Kegiatan pengawasan bersifat transparansi terhadap seluruh anggota sekolah dan barang yang akan dibeli tidak boleh melebihi anggaran dan harus sesuai dalam laporan RAPBS. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru dan bendahara sekolah SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta.

Jenis pengawasan yang dilakukan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta adalah jenis pengawasan melekat sesuai dengan teori menurut Matin (2014-188) yaitu: "pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan

langsung kepada bawahannya, atau pengawasan terhadap kinerja bawahan dilaksanakan oleh atasan langsungnya bukan oleh pihak lain”

Dari teori diatas dikaitkan dengan hasil perolehan jawaban wawancara penelitian oleh kepala sekolah, kemudian yang didapat temuan penelitian bahwa kegiatan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah setiap sebulan sekali untuk kegiatan sekolah. RAPBS menurut Daryanto dan Farid perlu disusun setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa aloksi anggaran bisa memenuhi sekolah secara maksimal.

Pengawasan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta dilakukan terus menerus sebagai kegiatan rutin sehari-hari untuk pemasukan dan pengeluaran pembiayaan dan dilakukan berkesinambungan. Kegiatan dilakukan secara rutin salah satu cara mengurangi kesalahan dan penyimpangan pada pembiayaan, sehingga pengawasan bersifat efektif dan pelaksanaan pengawasan keuangan pendidikan harus mampu mencegah secara tuntas setiap masalah penyimpangan dalam pembiayaan. Kegiatan pengawasan di SD Muhammadiyah memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan, jadi dalam pelaporan RAPBS harus sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta mengenai kemandirmanaan sekolah dalam manajemen pembiayaan adalah sebagai berikut.

1. Sumber dana pembiayaan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta ada empat sumber dana yang diperoleh sekolah meliputi, BOS Pusat, BOSDA, PDM Yogyakarta, dan Sumbangan wali murid. Jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa. Kemudian sekolah mempunyai subsidi silang bagi peserta didik kurang mampu dan bantuan dari Jaminan Pendidikan Daerah (JPD).
2. Perencanaan pembiayaan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta Perencanaan dalam pembiayaanterletak pada penambahan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri peserta didik. Perencanaan pembiayaan untuk program tahunan sekolah mempermudah sekolah untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam mengatur keuangan sekolah dan memperkirakan berapa dana yang dibutuhkan sekolah.
3. Pelaksanaan pembiayaan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, dimulai dari ketentuan pemasukan dan pengeluaran anggaran belanja sampai dengan pengalokasian sarana dan prasarana sekolah.
4. Pengawasan pembiayaan pada SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, pengawasan dilakukan monitoring secara rutin oleh kepala sekolah, dan waktu pengawasan pertanggungjawaban pembiayaan yang bersifat transparasi di bukukan ke dalam laporan RAPBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan,Nor. (2006). Full Day School (Model Alternatif PembelajaranBahasa Asing). Jurnal Pendidikan. Tadris. Vol 1. Nol.
- Daryanto & Mohammad Farid.(2013). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan diSekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fattah. Nanang(2011). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Matin.(2013). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suharsaputra, Uhar. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Supriadi, Dedi.(2010). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya